

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Pada bab ini akan disajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti juga akan menjelaskan hasil penelitian dihubungkan dengan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Sesuai data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara, Penerapan Sistem informasi manajemen daerah memegang peranan penting terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Blitar, dalam penerapan Sistem informasi manajemen daerah dimulai sejak tahun 2009 sampai sekarang 2019. Aplikasi Simda selalu mengalami pembaruan version agar dapat mengoptimalkan aplikasi, agar Pemerintah sebagai penyelenggara dan sebagai pengguna anggaran negara wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya. Penerapan sistem pertanggungjawaban tersebut harus tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung bersih dan bertanggungjawab.

Dalam prosesnya penerapan Aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar sangat membantu bagi pegawai dan staff dalam penganggaran dan pelaporan, karena didalam aplikasi SIMDA ini menyediakan database aspek

keuangan, asset keuangan daerah, kepegawaian atau aparatur maupun pelayanan publik. Sehingga dapat mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Aplikasi SIMDA sangat membantu sama seperti yang diungkapkan pada penelitian Mitam, yang menyampaikan bahwa SIMDA Keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem, selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem.¹

Saat ini pemerintah kota serta pemerintah kabupaten telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah yang disediakan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu Pengawasan Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terhubung langsung dengan database Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Perwakilan BPKP melakukan pendampingan teknis mengenai implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan pada BPKAD Kabupaten Blitar pada tahun 2009. Suatu aplikasi komputer yang merupakan salah satu dari komponen Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang sediakan sebagai aplikasi pembantu Pemerintah Daerah pada sistem akuntansinya mulai dari

¹ Mitami Dian M, *Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Blitar*, (Universitas Hasanuddin Makassar : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

menyelenggarakan hingga mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Ini sama halnya yang disampaikan oleh Monica, yang menyatakan bahwa tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, pelaksanaan kebijakan, memberikan informasi keuangan yang terbuka, dan jujur.²

Aplikasi Simda yang ada di BPKAD Kabupaten Blitar berbasis akrual yaitu pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Pemerintah mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada aplikasi SIMDA, agar pengelolaan aplikasi teknologi informasi yang semakin memadai, pemerintah daerah dapat mengolah transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Satrio juga menyampaikan bahwa Salah satu aspek yang dapat mendukung kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah aspek pengelolaan teknologi informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena jumlah transaksi yang besar dan semakin kompleks

² Sepang Gisella Monica, *Penerapan Sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12 , No.2, 2017.

memiliki risiko tingkat kesalahan yang tinggi jika dilaksanakan secara manual.³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar sangat membantu bagi pegawai dan staff dalam penganggaran serta pelaporan keuangan. Sehingga dapat mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dalam prosesnya aplikasi SIMDA sudah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai standart yang berlaku di Indonesia.

B. Penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan dalam pandangan Islam

SIMDA yang diterapkan di Kabupaten Blitar sampai saat ini sudah mencakup berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar ini sudah memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu pada tahap pengambilan keputusan secara tidak langsung memberikan stimulus kepada banyak organisasi akan kebutuhan sistem informasi yang komprehensif, tepat, jujur dan akurat sehingga data nya dapat dipercaya serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

³M. Dimas Satrio, *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 18, No. 1, Mei 2016.

Penerapan Aplikasi SIMDA di BPKAD Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan standart PSAK karena dalam membuat laporan keuangan sudah menggunakan akrual basis dalam proses laporan keuangan dan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material. Laporan keuangan yang baik harus disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan semua pihak dengan tujuan dapat menyenangkan hati penerima informasi, Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah.

Hal ini diperkuat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 atau PSAP 01 yang berisi Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAP 01 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.02 untuk SAP Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.02 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.⁴

Hal ini juga diperkuat dengan laporan keuangan Basis akrual pada Akuntansi Keuangan Syariah berdasarkan PSAK No. 101 dinyatakan bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).⁵

⁴ Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Daerah.

⁵Dewan Standart Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuangan Syaria*, (IAI : Jakarta ,2019). hlm.7.

Ini juga sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Agustin yaitu sistem informasi manajemen berdasarkan syariah adalah proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan jujur berdasarkan Al Quran dan Hadist untuk dapat digunakan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.⁶

Secara spesifik, al Qur'an menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar, memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Informasi dapat menyenangkan hati penerima informasi. Sesuai dengan

Q.S. Hud Ayat 120. Allah Taala berfirman :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.*⁷

b. Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil Q.S

Al-Baqoroh Ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*⁸

⁶ Hamdi Agustin, *Sistem informasi manajemenurut perspektif Islam*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol. 1, No. 1, 2018.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm.235.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm.7.

- c. Informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak. Allah Taala berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat Ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*⁹

- d. Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan/pertentangan diantara penerima dan dapat mendamaikan dari perselisihan mereka Q.S Al-Baqarah Ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : *manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.*¹⁰

⁹Ibid., hlm.616.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm.33.

- e. Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif. Penyampaian informasi yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi yang mendorong munculnya semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan (*sabiqun bil al kahiraat*) serat dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya. Q.S. Al-Maidah Ayat 48 dan 83 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : *Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain it, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya,lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*¹¹

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Artinya : *Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu Lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari Kitab-Kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman, Maka catatlah Kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s.a.w.).*¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.116.

¹² *Ibid.*, hlm. 122

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kahfi yaitu informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur merendahkan, mencela, dan mencemarkan nama baik orang lain, tidak mengandung kecurigaan dan buruk sangka, tidak ada unsur mencari-mencari kesalahan dan keburukan orang lain, tidak mengandung unsur menggunjingkan orang lain, tidak ditambah-tambah interpretasi subjektif dan tidak memutarbalikan fakta sebenarnya atau memutarbalikan informasi yang benar menjadi bohong dengan tujuan menyebar fitnah.¹³

Jadi, aplikasi Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar terhadap kualitas laporan keuangan dalam perpektif Islam sudah memenuhi karakteristik informasi yang hak dan benar didalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar, memiliki karateristik Informasi dapat menyenangkan hati penerima informasi, Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil, Informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak, Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan atau pertentangan di antara penerima dan dapat mendamaikan dari perselisihan mereka dan Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif.

¹³ Hamdi Agustin, *Informasi dalam perspektif Islam*, jurnal Mediator, Vol. 7, No. 2, 2006.

C. Kendala yang dihadapi saat penerapan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Kendala yang terjadi pada saat penerapan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar pada umumnya terjadi karena saat pengentrian data terkadang masih mengalami kesalahan. Kendala tersebut terjadi karena beberapa penyebab diantaranya yaitu :

1. Dari faktor internal dari pihak BPKAD Kabupaten Blitar adalah dari sistem itu sendiri kurang sempurna sehingga data yang sudah di entry terkadang mengalami kesalahan.
2. Faktor eksternal dari BPKAD Kabupaten Blitar adalah kurangnya pengertian dan ketidaktelitian sehingga dalam melakukan pengentrian data oleh pegawai dan staff BPKAD Kabupaten Blitar masih mengalami kesalahan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang disampaikan Hertanto bahwa Kurang fleksibelnya aplikasi SIMDA Keuangan mempengaruhi seluruh perbaikan sistem aplikasi dan hanya bisa menunggu respon dari BPKP selaku pengembang program SIMDA Keuangan dan yang terakhir permasalahan sumber daya manusia selaku operator yang masih belum maksimal dalam pengoperasian SIMDA Keuangan.¹⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Rahantoknam yang menyatakan bahwa secara kualitas telah mengerti tentang tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan tetapi secara kuantitas masih terdapat Sumber Daya Manusia yang

¹⁴ Yogi hertanto, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan*, dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1, No.2 Oktober 2016.

tidak paham dalam penerapan SIMDA Keuangan jadi masih ada ketergantungan pada sebagian orang yang memahami SIMDA Keuangan.¹⁵

Uraian tersebut diperkuat oleh pendapat Alfian bahwa tidak digunakannya SIMDA oleh karyawan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pada pos-pos tertentu salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan tidak tercapainya tujuan dari implementasi SIMDA yang dicanangkan oleh BPKP sebagai salah satu faktor pendukung terciptanya Sistem Pengendalian Internal.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian serta penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kendala yang terjadi pada saat penerapan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar terdapat kendala dalam pelaksanaan penerapan SIMDA. Dengan demikian jelaslah bahwa yang muncul sebagai kendala dalam pelaksanaan penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Blitar bisa berasal dari faktor internal dalam Aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Aplikasi SIMDA di BPKAD Kabupaten Blitar.

¹⁵ Trivena Anastasia Rahantoknam, *Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah keuangan pada badan keuangan aset daerah Kabupaten Maluku Tenggara*, dalam Jurnal Riset Akuntansi Concern, Vol. 12, No. 2, 2017.

¹⁶ Mohammad Alfian, *Faktor pendukung implemetasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo*, Vol.18, No. 3, 2015.

D. Solusi untuk masalah yang dihadapi saat menerapkan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pulungan mengungkapkan bahwa skill pengoperasian Simda meliputi pelatihan dan manfaat yang diperoleh dari pelatihan untuk peningkatan skill pengelola sehingga diperoleh sumber daya manusia yang siap mengoperasikan Simda. Sementara pengoperasian Simda sendiri bukan hanya mencakup aspek pengimplementasiannya yang berupa penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi serta pelaporan saja, tetapi juga mencakup penanganan dini jika implementasi Simda bermasalah. pasca pengoperasian.¹⁷

Uraian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Diana yang mengungkapkan Pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas, baik perangkat komputer maupun jaringan internat yang mendukung penggunaan sistem informasi serta menggiatkan sosialisasi implementasi SIMDA atau memberikan pelatihan secara bertahap dan berkala kepada pegawai yang terlibat agar penggunaan SIMDA menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.¹⁸

Sedangkan dalam penelitian ini berdasar keterangan wawancara dengan beberapa Pegawai dan Staff BPKAD Kabupaten Blitar ditemukan

¹⁷ M. Soleh Pulungan, *Optimalisasi Simda Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Yang Lebih Berkualitas*, pada Jurnal Jurnal Bina Praja, Vol.6 No.4, 2014.

¹⁸ Patricia Diana, *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias*, pada Jurnal Ultima Accounting, Vol.10, No.2, 2018.

bahwa untuk mengatasi dan menangani kendala penerapan SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Membuat Group whasap kusus untuk mendiskusikan aplikasi SIMDA
2. Dilakukan koordinasi dengan BPKP atas kendala yang dihadapi agar dapat mengoptimalisasi aplikasi SIMDA sesuai dengan yang di harapkan.
3. Diadakanya 1 sampai 4 kali pelatihan/diklat agar SDM yang menjalankan aplikasi ini lebih berkualitas sehingga menghasilkan laporan yang baik.
4. Dilakukan pembenahan regulasi, dilakukan peningkatan kemampuan dan wawasan tiap personil dalam BPKAD Kabupaten Blitar tentang teknologi dan sistem informasi serta meningkatkan performansi sistem aplikasi di BPKAD Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian saat ini persamaannya terletak pada proses dilakukannya peningkatan dan wawasan tiap personil dengan cara pelatihan bertahap dan berkala kepada pegawai yang terlibat agar penggunaan SIMDA menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada cara mencari solusi dalam mengatasi kendala aplikasi SIMDA yang bermasalah, di BPKAD Kabupaten Blitar mengatasi masalah ini dengan cara Membuat Group whasap kusus untuk mendiskusikan aplikasi SIMDA, dimana jika ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIMDA dapat ditanyakan melalui group whasap diharapkan Daerah yang mempunyai kesulitan yang sama dan sudah menemukan solusinya mungkin dapat di informasikan untuk mengatasi kesulitan di Daerah lain serta dilakukan koordinasi dengan BPKP atas

kendala yang dihadapi agar dapat mengoptimalkan aplikasi SIMDA sesuai dengan yang diharapkan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah benang lurus bahwa pelaksanaan yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Blitar merupakan langkah antisipasi dari kendala-kendala yang dapat muncul di tengah-tengah pelaksanaan penerapan SIMDA baik kendala internal maupun eksternal sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya.